

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013



**PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN**

Gedung E Lt.6 Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Ragunan Jakarta Selatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, maka Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganeekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar. Adapun fungsi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan; (b) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganeekaragaman pangan; dan (c) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi keamanan pangan segar.

Mengacu visi, arah dan kebijakan pembangunan pertanian, maka disusun Visi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu: "Menjadi Institusi yang Handal, Aspiratif dan Inovatif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman". Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menetapkan misi sebagai berikut: (1) Mendorong terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah; (2) Mengupayakan penganeekaragaman konsumsi pangan; (3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam perencanaan, pembinaan dan penanganan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; serta (4) Mendorong terwujudnya keamanan pangan segar di peredaran.

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat agar dengan sukarela dan dengan kemampuannya sendiri melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk meningkatkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan ke arah pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang serta mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat khususnya beras dan pangan impor yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta buah dan sayur dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah; (3) Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu; dan (4) Mengembangkan penanganan keamanan pangan yang meliputi (a) pemberdayaan konsumen, (b) pengembangan keamanan pangan industri kecil, menengah dan rumah tangga, serta (c) pengawasan keamanan pangan segar yang beredar.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar adalah : (1) Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar

52 gram/kapita/hari dengan meningkatkan protein yang bersumber dari pangan hewani; (2) Menurunnya konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayuran dan buah, sehingga tercapai peningkatan skor PPH sebesar 2 persen per tahun; (3) Meningkatnya pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu; dan (4) Meningkatnya keamanan pangan segar di pasar (*end product*) dan kepedulian konsumen. Dan sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Keberhasilan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Pengukuran Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2013 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai berikut: (1) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (6.280 desa terealisasi 6028 desa atau 96 %); (2) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (531 laporan terealisasi 495 laporan atau 93,2 %); (3) Jumlah hasil promosi (33 laporan terealisasi 33 laporan atau 100 %); (4) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (285 laporan terealisasi 221 laporan atau 77,5 %); (5) Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar (34 laporan terealisasi 34 laporan atau 100 %); (6) Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal (31 laporan terealisasi 25 laporan atau 80,7 %); dan (7) Hasil percontohan Fortifikasi Beras (1 laporan, diluncurkan kembali tahun 2014*). Berdasarkan penyerapan anggaran, APBN tahun 2013 untuk Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) yang dialokasikan pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar adalah sebesar Rp. 353.693.160.000,- direvisi menjadi Rp. 339.637.956.000,- terealisasi sebesar Rp. 329.151.639.082,- atau 96,37 %. Untuk anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 14.683.750.000,- direvisi menjadi Rp. 9.472.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.524.844.172,- atau 90,00 %.

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti dalam optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya perubahan, pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator kinerja antara lain:

*) Tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pengadaan premix dan feeder oleh *Asian Development Bank* (ADB), anggaran akan diluncurkan Tahun 2014.

(1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck* (3) meminimalkan *wasting time*; dan (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan.

Untuk mencapai sasaran dan kinerja kegiatan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain.

Pelaksanaan dari kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengacu kepada landasan hukum yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan Pasal 9; (3) Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; (4) Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2013 disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2013. Penyusunan LAKIP ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan fokus orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan.

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Perencanaan Kinerja.....	4
2.2. Penetapan Kinerja	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1. Kriteria Keberhasilan.....	9
3.2. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (PKKP) TA 2013	9
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat PKKP TA 2013.....	12
3.4. Dukungan Instansi Lain	19
3.5. Akuntabilitas Keuangan.....	20
3.6. Hambatan.....	21
3.7. Upaya Yang Dilakukan	22
BAB IV. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	23
BAB V. PENUTUP.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Rencana Strategik
2. Lampiran 2. Penetapan Kinerja
3. Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Lampiran 4. Pengukuran Kinerja

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2013 dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Tahunan. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013 berarti telah terselesaikan implementasi salah satu bagian dari rencana strategis (Renstra) 2010 – 2014 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013.

Laporan kinerja ini disusun guna menindaklanjuti Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, keseluruhan perangkat hukum yang ada menegaskan terhadap segenap elemen dari bangsa untuk sungguh-sungguh menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance and clean goverment*. Implementasi dari Undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan dalam manajemen pemerintah.

LAKIP Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2013 merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan program pemantapan ketahanan pangan, sekaligus sebagai bahan informasi, evaluasi dan pembinaan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada masa yang akan datang bisa berjalan lebih baik.

Cara pengukuran penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan laporan lebih bersifat *self assessment*, dan disadari masih belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki sesuai kondisi pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kiranya LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Jakarta, Januari 2014

Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan,

Ir. Sri Sulihanti, M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dipahami sebagai: "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa mewujudkan Ketahanan Pangan tersebut adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan Pangan dihasilkan oleh suatu sistem Ketahanan Pangan yang terdiri dari 3 subsistem, yaitu : (a) Sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Khusus terhadap upaya pencapaian konsumsi pangan individu tersebut ditempuh melalui upaya peningkatan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup melalui kegiatan ekonomi produktifnya, baik dari usaha agribisnis pangan atau dari usaha lainnya yang menghasilkan pendapatan untuk membeli pangan, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Untuk memantapkan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan dilaksanakan dengan kegiatan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut selama tahun 2013, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2013.

1.1.1. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada :

- a) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan;
- b) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- c) Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian

1.1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2013.

1.1.3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2013

Sistematika penyusunan LAKIP mengacu pada format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Kementerian Pertanian dalam kaitannya dengan peran strategi Ketahanan Pangan, melalui Peraturan Presiden No.24 tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dalam pasal 272, Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan suatu unit kerja Eselon I dalam struktur Kementerian Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPKKP) merupakan unit Eselon II dengan tugas pokok dan fungsi tercantum dalam pasal 1200 dan 1201 sebagai berikut: Tugas Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah *"melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar"*, sedangkan fungsi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan; (b) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan; dan (c) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi keamanan pangan segar.

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 bidang, yaitu:

1. Bidang Penganeekaragaman Pangan;
2. Bidang Konsumsi Pangan; dan
3. Bidang Keamanan Pangan Segar.

Bidang Penganeekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganeekaragaman pangan. Bidang Penganeekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi Penganeekaragaman Pangan.

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan. Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan dan Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan.

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan segar. Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Sub Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Ruh, Visi dan Misi

a. Ruh

Sesuai dengan ruh pembangunan pertanian nasional maka ruh pengembangan pembangunan konsumsi dan keamanan pangan adalah **Bersih** dan **Peduli**. **Bersih** berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan, dan akuntabel. **Peduli** berarti memberikan fasilitasi pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

b. Visi

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan mempunyai visi *"Menjadi Institusi yang Handal, Inovatif dan Aspiratif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.*

c. Misi

Untuk mencapai visi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tersebut, maka ditetapkan serangkaian misi sebagai berikut :

- 1). Mendorong terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah.
- 2). Mengupayakan penganekaragaman konsumsi pangan
- 3). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam perencanaan, pembinaan dan penanganan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 4). Mendorong terwujudnya keamanan pangan segar di peredaran.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Dengan memperhatikan ruh, visi dan misi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, maka ditetapkan tujuan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat agar dengan sukarela dan dengan kemampuannya sendiri melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- 2). Meningkatkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ke arah pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang serta mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat khususnya beras dan pangan impor yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta buah dan sayur dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah.
- 3). Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu.
- 4). Mengembangkan penanganan keamanan pangan yang meliputi (a) pemberdayaan konsumen, (b) pengembangan keamanan pangan industri kecil, menengah dan rumah tangga, serta (c) pengawasan keamanan pangan segar yang beredar.

b. Sasaran Strategis

Sasaran yang hendak dicapai dalam penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar adalah :

- 1). Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar 52 gram/kapita/hari dengan meningkatkan protein yang bersumber dari pangan hewani;
- 2). Menurunnya konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayuran dan buah, sehingga tercapai peningkatan skor PPH sebesar 2 persen per tahun;
- 3). Meningkatnya pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu;
- 4). Meningkatnya keamanan pangan segar di pasar (*end product*) dan kepedulian konsumen.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah : **Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar** yang diukur berdasarkan indikator bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan (jumlah desa/laporan/jumlah hasil kegiatan).

2.1.3. Cara Mencapai Tujuan

a. Kebijakan

Ketahanan pangan keluarga dipengaruhi oleh daya beli, kebiasaan makan, pengetahuan gizi dan status sosial. Sejalan dengan itu, pemantapan ketahanan pangan rumah tangga dilakukan secara komprehensif dengan meningkatkan pembinaan faktor-faktor yang lemah yang menyebabkan permasalahan ketahanan pangan di kalangan masyarakat.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, potensi, dan permasalahan, serta arah dan strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong tercapainya:

- 1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nutrisi bagi kesehatan dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- 3) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumberdaya khas daerah, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 4) Peningkatan partisipasi industri yang mengolah bahan pangan khas daerah yang terjangkau oleh masyarakat;
- 5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya khas daerah;
- 6) Peningkatan kesadaran dan kemampuan industri/usaha kecil dan menengah serta rumah tangga terhadap pentingnya keamanan pangan.

b. Program Operasional

Pelaksanaan misi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Pelaksanaan program ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Penanganan Keamanan Pangan Segar (PKPS), kegiatannya meliputi:

- 1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- 2) Pengembangan Konsumsi Pangan;
- 3) Penanganan Keamanan Pangan;
- 4) Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 5) Monitoring dan Evaluasi.

2.1.4. Rencana Kinerja Tahun 2013

Rencana kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2013 merupakan implementasi rencana jangka menengah (2010-2014) ke dalam rencana kerja jangka pendek yang meliputi: (1) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (6.280 desa); (2) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (531 Laporan); (3) Jumlah hasil promosi (33 Laporan); (4) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (285 Laporan); (5) Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar (34 Laporan); (6) Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal (31 laporan); (7) Hasil percontohan Fortifikasi Beras (1 laporan).

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan utama antara lain: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Pengembangan Konsumsi Pangan, Penanganan Keamanan Pangan dan Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Subkegiatan-subkegiatan dalam program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penganekaragaman Pangan
 - a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep KRPL
 - b. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
 - c. Sosialisasi dan Promosi P2KP
 - d. Pengembangan Olahan Pangan Lokal (Pusat)
 - e. Iklan dan Materi Promosi P2KP (Pusat)
 - f. Promosi P2KP (Pusat)

2. Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
 - a. Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk
 - b. Kajian Faktor Koreksi Konsumsi Pangan Penduduk
 - c. Apresiasi Pengembangan Pola Konsumsi Pangan
 - d. Workshop Konsumsi Pangan Berbasis PPH
 - e. Festival Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
3. Pengawasan Keamanan Pangan Segar
 - a. Koordinasi Keamanan Pangan Segar
 - b. Promosi Keamanan Pangan Segar
 - c. Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar
 - d. Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh
 - e. Operasionalisasi LSP
 - f. Pengawasan Keamanan Pangan Segar
 - g. Pengadaan Mobil Fungsional Keamanan Pangan Segar

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan Ketahanan Pangan (atasan) dan Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (bawahan) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan, indikator sasaran pada kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan; dan (2) Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun.

Keberhasilan pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai rencana kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2013 indikator kinerja yang ingin dicapai adalah:

1. Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (6.280 desa);
2. Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (531 Laporan);
3. Jumlah hasil promosi (33 Laporan);
4. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (285 Laporan);
5. Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar (34 Laporan);
6. Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal (31 laporan);
7. Hasil percontohan Fortifikasi Beras (1 laporan).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Keberhasilan

Kreteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan pencapaian sebagai berikut:

- Sangat berhasil : jika capaian kinerja > 100%
- Berhasil : 80-100%
- Cukup Berhasil : 60-79%
- Tidak Berhasil : < 60%

3.2. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan TA 2013

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Keberhasilan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat tercermin dengan realisasi indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan, indikator kinerja *outcomes* program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah (1) Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan 91,5; dan (2) Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun 1,5 %, pencapaian ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pencapaian Indikator Kinerja *Outcomes*

Sasaran	Indikator Kinerja Outcome	Target	Capaian	Keterangan
Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,5	81,4	88,9 persen
	b. Penurunan konsumsi beras per tahun	1,5%	0,3%	Tahun 2012 = 96,6 kg/kap/tahun Tahun 2013 = 96,3 kg/kap/tahun

Sumber : Susenas 2012-2013, BPS diolah BKP

Pada tahun 2013, dengan mempertimbangkan peningkatan pengeluaran untuk konsumsi, maka dilakukan penyesuaian untuk penghitungan angka skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan menggunakan koreksi Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2009). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, dari sisi kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2009-2013 secara umum telah terjadi peningkatan dari 75,7 tahun 2009 menjadi 81,4 tahun 2013.

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	1927	2025	2048	1944	1930
Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	54.3	57.9	59.1	55.9	55.7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75.7	85.7	85.6	83.5	81.4

Sumber data : Susenas BPS, diolah BKP Kementan

Dari sisi komposisi, keragaman konsumsi kelompok pangan masih didominasi kelompok pangan bersumber dari padi-padian, melebihi konsumsi ideal sebesar 50 persen. Konsumsi umbi-umbian baru tercatat sebesar 2-3 persen, belum mencapai proporsi ideal sebesar 6 persen, seperti dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2011-2013

Kelompok Pangan	2012		2013		Anjuran	
	Energi	%AKG	Energi	%AKG	Energi	% AKG
a. Padi-padian	1155	57,7	1164	58,2	1.000	50,0
b. Umbi-umbian	41	2,0	39	1,9	120	6,0
c. Pangan hewani	183	9,1	174	8,7	240	12,0
d. Minyak dan lemak	241	12,1	233	11,6	200	10,0
e. Buah/biji berminyak	43	2,1	39	1,9	60	3,0
f. Kacang-kacangan	59	2,9	58	2,9	100	5,0
g. Gula	91	4,5	93	4,7	100	5,0
h. Sayur dan buah	100	5,0	96	4,8	120	6,0
i. Lain-lain	32	1,6	35	1,8	60	3,0
Total	1944	97,2	1930	96,5	2000	100
Skor PPH	83,5		81,4		100	

Sumber data : Susenas BPS 2012 – 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian

Secara nasional, kualitas/keragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor PPH mengalami penurunan dari 83,5 pada tahun 2012 menjadi 81,4 pada tahun 2013. Oleh karena itu, untuk terwujudnya konsumsi masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang diperlukan upaya: 1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengonsumsi pangan B2SA melalui KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) Penyediaan sayuran & buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

Pada tahun 2013, konsumsi beras langsung dalam rumah tangga tercatat sebesar 96,3 kg/kapita/tahun, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 (96,6 kg/kapita/tahun)

maka terjadi penurunan sebesar 0,3 % dari target penurunan sebesar 1,5% per tahun. Penurunan konsumsi beras tahun 2013 dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi makanan jadi asal beras di luar rumah seperti restoran, cafe, dan lain-lain.

Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, maka konsumsi pangan masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi beras mengalami penurunan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat akan tetap tinggi, sehingga diharapkan pola konsumsi pangan masyarakat dapat mengarah pada pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang, masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu, belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga, serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Skor PPH dan penurunan konsumsi beras merupakan indikator *outcomes*, sedangkan *Output* Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tercermin dari Indikator Kinerja Utama Pusat seperti yang terdapat pada Tabel 3, yaitu (1) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP; (2) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (laporan); (3) Hasil promosi (laporan); (4) Hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (laporan); (5) hasil koordinasi keamanan pangan segar (laporan); (6) Hasil pengembangan olahan pangan lokal (laporan); dan (6) Hasil percontohan fortifikasi beras (laporan).

Pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 4. Dari pencapaian kinerja Pusat PKK TA 2013, secara umum beberapa indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Capaian kinerja yang sudah memenuhi kriteria berhasil antara lain: jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (96 %/revisi 100 %), jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP (93,2 %), jumlah hasil promosi (100 %), jumlah hasil pengembangan pangan lokal (80,07 %/revisi 100 %) dan laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar (100 %). Kegiatan yang cukup berhasil adalah: jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (77,5 %). Kegiatan fortifikasi tidak dapat terealisasi karena terkendala pengadaan premix dan feeder oleh *Asian Development Bank* (ADB), anggaran akan diluncurkan Tahun 2014.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2013.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	% capaian kinerja	
			Awal	Revisi		Awal	Revisi
1.	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan pangan segar	Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP	6280 desa	6028 desa	6028 desa	96	100
		Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP	531 laporan	-	495 laporan	93,2	-
		Jumlah hasil promosi	33 laporan	-	33 laporan	100	-
		Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	285 laporan	-	221 laporan	77,5	-
		Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar	34 laporan	-	34 laporan	100	-
		Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal	31 laporan	25 laporan	25 laporan	80,7	100
		Hasil percontohan Fortifikasi Beras	1 Laporan	-	-*)	-*)	-

- Sumber : Dokumen PK Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Keterangan: *) Tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pengadaan premix dan feeder oleh *Asian Development Bank (ADB)*, anggaran akan diluncurkan Tahun 2014.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat PKKP TA 2013

3.3.1 Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan pangan segar

Evaluasi dan analisis pencapaian target kinerja tahun 2013 pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP

Pada tahun 2013 jumlah desa P2KP yang diberdayakan sebanyak 6280 desa, terdiri dari 1280 desa lanjutan tahun 2012 dan 5000 desa baru tahun 2013. Pada pertengahan tahun 2013 terjadi penghematan anggaran pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan target desa baru yang semula 5000 desa dikurangi 252 desa sehingga menjadi 4748 desa. Untuk desa lanjutan tahun 2012 mendapatkan bansos sebesar Rp3.000.000 yang digunakan untuk pengembangan kebun bibit kelompok. Sedangkan desa baru tahun 2013 mendapatkan bansos sebesar Rp47.000.000 dengan rincian:

- a. Rp30.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota
- b. Rp12.000.000 untuk kebun bibit
- c. Rp3.000.000 untuk pengembangan kebun sekolah
- d. Rp2.000.000 untuk praktek pengembangan menu B2SA di kelompok

Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu desa P2KP ini terdiri dari kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh kelompok wanita, kegiatan pengembangan kebun sekolah oleh salah satu SD/MI yang ada di desa tersebut, serta pendampingan kegiatan oleh pendamping desa. Pada umumnya beberapa daerah mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana bansos, hal ini dikarenakan adanya pergantian pejabat/pimpinan di daerah yang begitu cepat. Selain itu, untuk kabupaten/kota yang dananya dekonsentrasi di provinsi, biasanya provinsi menunggu semua kabupaten/kota lengkap dulu semua berkasnya baru diproses. Padahal proses pencairan tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan dari masing-masing kabupaten/kota. Hal lain juga yang menjadi kendala adalah kondisi alam/geografis lokasi kegiatan yang jauh dari kantor, sehingga butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan.

Jika dibandingkan dengan kegiatan pada tahun 2012, kegiatan KRPL tahun 2013 dapat terlaksana lebih baik dari realisasi di lapangan karena paket bansos yang diberikan lebih lengkap dengan komponen biaya lebih besar. Namun secara realisasi kegiatan tahun 2013 hanya dapat terealisasi sebesar 95,9 %, sedangkan tahun 2012 terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 2013 terjadi kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah sehingga mengurangi jumlah target desa baru tahun 2013 yang seharusnya 5000 desa menjadi 4748 desa. Sedangkan jika diukur berdasarkan target setelah penghematan, maka realisasi kegiatan tahun 2013 mencapai 100% yaitu 4748 desa baru dan 1280 desa lanjutan.

Dari hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan, kegiatan KRPL ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para kelompok penerima manfaat serta dapat memberikan aspek pemberdayaan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya penghematan pengeluaran rumah tangga untuk belanja sayuran dan buah, karena komoditas tersebut sudah bisa didapat dari hasil pekarangan. Selain itu kelompok wanita penerima manfaat kegiatan KRPL ini juga mengalami penambahan jumlah anggota dikarenakan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta merasakan manfaat dari kegiatan ini. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KRPL ini antara lain adalah (1) keterlambatan pencairan bansos dikarenakan proses administrasi di daerah yang terhambat dengan adanya pergantian pejabat, (2) lokasi

geografis/medan yang cukup berat sehingga secara operasional kegiatan menjadi lambat, (3) tingkat kemampuan kelompok yang tidak merata dalam memahami dan melaksanakan kegiatan sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif oleh penyuluh pendamping, serta (4) adanya penghematan anggaran di pusat sehingga perlu dilakukan revisi anggaran padahal di daerah sudah dilakukan identifikasi penerima manfaat.

2. Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP, perlu dilakukan beberapa kegiatan pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan tersebut. Kegiatan P2KP membutuhkan penanganan yang intensif untuk mengawal dan memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan serta pendampingan kegiatan. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan tersebut antara lain adalah:

- a. Menyusun buku pedoman gerakan P2KP yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan P2KP baik di pusat maupun di daerah bagi aparat, pendamping, kelompok maupun pihak lain yang terkait.
- b. Melakukan pemantauan ke provinsi, kabupaten/kota, hingga ke lokasi desa untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan P2KP di lapangan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar diketahui kendala apa saja yang dihadapi baik oleh aparat maupun kelompok sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.
- d. Melengkapi data lokasi dan penerima manfaat serta pendamping kegiatan P2KP dengan merekap dan menginput data dari daerah melalui SK penetapan penerima manfaat dan pendamping yang dibuat oleh provinsi dan kabupaten/kota.
- e. Melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan dengan memberikan arahan-arahan dan masukan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- f. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dalam bentuk rapat, pertemuan, atau kegiatan lainnya; yang mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan P2KP baik di pusat maupun di daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan baik di pusat maupun daerah. Untuk pelaksanaan di daerah pelaporannya sudah terealisasi sebanyak 495 laporan (93,2 %) yang terdiri dari laporan kabupaten/kota dan provinsi. Semula target *output* untuk kegiatan ini sebanyak 531 laporan yang terdiri dari 497 kab/kota, 33 provinsi, dan 1 pusat. Namun dengan adanya penghematan anggaran, jumlah kabupaten/kota berkurang menjadi 484 kab/kota. Kegiatan monitoring, pemantauan, dan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan kegiatan secara teknis dapat dipantau dan diketahui perkembangannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Kendala yang dihadapi untuk kegiatan ini adalah dana operasional yang terbatas dengan kondisi geografis daerah yang medannya cukup sulit, sehingga daerah-daerah tersebut tidak terpantau secara optimal. Oleh karena itu untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang perlu adanya alokasi anggaran

operasional secara lebih proporsional lagi bagi daerah kepulauan, wilayah timur Indonesia serta daerah lain yang sulit kondisinya geografisnya.

3. Jumlah hasil promosi

Kegiatan promosi P2KP dilakukan di pusat dan di 33 provinsi. Promosi P2KP ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebaran informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif. Kegiatan Promosi P2KP dilaksanakan di 33 provinsi melalui berbagai macam kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa cetak maupun elektronik, promosi pola pangan B2SA seperti "*One day No Rice*", Lomba Cipta Menu Pangan B2SA, pameran diversifikasi pangan fokus pada pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, gerakan kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta melalui pelibatan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat. Indikator kinerja hasil promosi P2KP diukur dengan jumlah laporan yang dihasilkan oleh provinsi. Dari 33 laporan yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 33 laporan (100 %).

Beberapa kendala yang terjadi dalam kegiatan Promosi P2KP antara lain adalah:

- a. Kreasi dan inovasi terhadap materi promosi di daerah belum berkembang, masih mencontoh materi/desain seperti yang di pusat, sehingga perlu dikembangkan lagi dengan menyesuaikan pada dana dan kemampuan masing-masing daerah;
- b. Keterbatasan anggaran promosi, sehingga menyebabkan kegiatan promosi dan sosialisasi belum dilakukan secara masif;
- c. Kegiatan promosi di daerah kurang terkoordinasi sehingga belum sejalan dengan kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di pusat.

4. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis pola konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, dan biasanya dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun 2015 dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada

peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap masyarakat dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yaitu : (1) analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, (2) kajian daftar komposisi bahan makanan, (3) apresiasi pengembangan pola konsumsi pangan, (4) workshop konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan dan (5) festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman.

Secara umum indikator kinerja kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk dituangkan dalam laporan analisis pola konsumsi pangan yang terdiri dari 2 laporan tingkat pusat, 33 laporan tingkat provinsi dan 250 laporan tingkat kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tahun 2013 adalah 221 laporan (77,5 %) yang terdiri dari pusat 100% (2 laporan), provinsi 87,9% (29 laporan) dan kabupaten/kota 76 % (190 laporan).

Kendala yang dihadapi oleh provinsi dan kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemantauan dan mengirimkan laporan analisis pola konsumsi pangan antara lain karena kurangnya SDM yang melakukan pemantauan konsumsi, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan staf untuk melakukan analisis konsumsi pangan penduduk, serta dana yang terbatas.

5. Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar

Undang - Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kondisi yang diharapkan adalah terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Mutu, Gizi, dan Keamanan Pangan telah memuat pembagian tugas dalam penanganan keamanan pangan. Untuk pengawasan keamanan pangan segar, merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan (BKP), sedangkan pengawasan keamanan pangan olahan menjadi tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan keamanan pangan segar di Kementerian Pertanian dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Badan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan segar. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BKP pada tahun 2013 secara garis besar terdapat

tiga kegiatan, yaitu penguatan kelembagaan keamanan pangan segar, pengawasan keamanan pangan segar dan promosi keamanan pangan segar.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 68, ayat (1) telah diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai Pangan secara terpadu. Hal tersebut semakin mempertegas arti penting keterpaduan dalam penanganan keamanan pangan. Sehingga hasil koordinasi keamanan pangan segar menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan keamanan pangan.

Indikator kinerja hasil koordinasi keamanan pangan segar dituangkan dalam laporan penanganan keamanan pangan segar yang terdiri dari 1 (satu) laporan tahunan di pusat dan 33 laporan di provinsi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan. Pencapaian kinerja di tahun 2013 adalah 100 % pusat (1 laporan tahunan pusat) dan 100% provinsi (33 laporan provinsi). Pencapaian tersebut sama dengan pencapaian kinerja di tahun 2012.

Pelaksanaan penanganan keamanan pangan segar di daerah pada tahun 2013 diarahkan pada kegiatan: (1) Penguatan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar; (2) Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar; serta (3) Sosialisasi, promosi dan apresiasi penanganan keamanan pangan segar. Pada pelaksanaannya, berdasarkan laporan daerah terdapat beberapa permasalahan, seperti: (1) Kurangnya komitmen kabupaten/kota terhadap penanganan keamanan pangan; (2) Rendahnya pemahaman produsen, konsumen termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan segar; (3) Adanya pelaku usaha buah dan sayur yang belum menerapkan *good practices* pada kegiatannya; (4) Kendala administrasi dalam pencairan anggaran; (5) Terbatasnya SDM, sarana prasarana dan laboratorium terakreditasi; (6) Masih kurangnya kerjasama/koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan keamanan pangan segar; (7) Belum optimalnya perencanaan kegiatan, dan lain-lain.

6. Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal

Upaya untuk mengembangkan olahan pangan lokal dilaksanakan melalui kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L). Tujuan dari kegiatan MP3L adalah untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai instansi termasuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan beras/nasi "non beras" sumber karbohidrat yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, berbahan baku sumber pangan lokal.
- b. Mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan non-beras/non-terigu dari sumber pangan lokal.
- c. Perbaiki mutu konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah.

Kegiatan MP3L pada tahun 2013 dilaksanakan di 30 kabupaten pada 18 provinsi. Namun dikarenakan adanya penghematan anggaran, kegiatan ini hanya dilaksanakan di 24 kabupaten pada 16 provinsi. Berdasarkan rencana kinerja tahunan, *output* kegiatan ini adalah 31 laporan kegiatan MP3L yang terdiri dari laporan kabupaten atau provinsi sebanyak 30 laporan dan pusat 1 laporan. Realisasi yang telah dicapai adalah sebanyak 25 laporan yang terdiri dari 24 laporan dari daerah dan 1 laporan pusat (80,6%). Namun demikian, dikarenakan adanya penghematan anggaran, maka target *output* kegiatan berkurang menjadi 25 laporan yang terdiri dari laporan kabupaten atau provinsi sebanyak 24 laporan dan pusat 1 laporan. Sehingga realisasi *output* kegiatan MP3L (setelah penghematan) mencapai 100%. Beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan MP3L ini antara lain adalah:

- a. Adanya keterlambatan pengadaan peralatan karena lokasi yang jauh dan proses administrasi yang terlambat
- b. Biaya produksi untuk produk-produk MP3L masih cukup tinggi sehingga harga jualnya masih lebih mahal daripada beras
- c. Kapasitas produksi yang masih terbatas dikarenakan ketersediaan teknologi dan peralatan yang juga terbatas (sesuai dengan anggaran yang ada)
- d. Belum semua produk diuji secara mendalam terkait dengan kandungan gizi dan selera penerimaan konsumen, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut melalui kerjasama dengan pihak perguruan tinggi

7. Hasil percontohan Fortifikasi Beras

Kegiatan fortifikasi merupakan Pilot Proyek yang dilaksanakan dengan dana Hibah Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) melalui *Asian Development Bank* (ADB). Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013 karena terkendala pengadaan premix dan feeder oleh ADB. Premix dan feeder yang dialokasikan di ADB merupakan penentu terlaksananya kegiatan lain yang dialokasikan di Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, sehingga tidak tercapainya kinerja bukan dikarenakan kinerja Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Alokasi anggaran kegiatan fortifikasi akan diluncurkan pada tahun 2014.

Dalam pengadaan premix dan feeder, proses pengembangan kemitraan antara ADB dan WFP telah dilakukan sejak Desember 2012, tetapi setelah 6 bulan, yaitu pada Juni 2013, kontrak tidak dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak karena ditemukan masalah rancangan kontrak yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, yang berakhir oleh penarikan WFP. Terkait dengan hal tersebut, ADB telah mengirimkan surat kepada EA tertanggal 3 Juni 2013 yang antara lain menyatakan memperpanjang durasi proyek selama satu tahun lagi.

Berdasarkan surat ADB, EA telah memberikan dukungan kepada perpanjangan periode proyek selama 12 Bulan untuk Desember 2014, sesuai dengan surat EA ke ADB, tanggal 7 Juni 2013. Berdasarkan prosedur resmi, usulan perpanjangan waktu proyek harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan ke ADB. Dalam kaitan ini, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas telah mengirimkan

memorandum kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas pada tanggal 21 Juni 2013 untuk menindaklanjuti proses pengajuan perpanjangan jangka waktu proyek ke Kementerian Keuangan.

3.4. Dukungan instansi lain

Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti :

1. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu setiap tahun sebagai bahan untuk melakukan analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat gambaran konsumsi pangan penduduk berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi 2013 dengan rancangan sampel yang representatif untuk estimasi level Nasional, serta melihat perkembangan/perubahan pola konsumsi pangan penduduk dibandingkan hasil Susenas 2012, baik konsumsi energi, protein maupun perubahan konsumsi pangan menurut komoditas dan kelompok pangan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Melalui program Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2010 – 2015 terutama dalam pilar Aksesibilitas Pangan. Rencana Aksi Pangan dan Gizi disusun dalam program berorientasi aksi yang terstruktur dan terintegratif dalam lima pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Pilar ini sebagai salah satu upaya sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang pada akhirnya kemandirian dan ketahanan pangan dapat terwujud.

3. Tim Penggerak PKK

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, TP PKK menjadi salah satu bagian dalam mendukung percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan. Salah satu kerjasama Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan TP PKK adalah dalam upaya pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

4. Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dalam Jejaring Keamanan Pangan Nasional

SKPT merupakan forum kerja sama antar instansi terkait untuk memantapkan program keamanan pangan di Indonesia. Lembaga-lembaga (stakeholders) yang terkait dalam sistem ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Pemerintah Daerah, Universitas, Lembaga penelitian, laboratorium pemerintah dan Swasta, Asosiasi Industri dan Perdagangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain.

Melalui Kemenkokesra, penganangan penerapan SKPT secara Nasional dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2004. Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan SKPT melalui Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Berdasarkan SK Menko Kesra No. 23 Tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan melalui Kepala Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan ditunjuk sebagai Sekretaris dalam Kelompok Kerja Jejaring Intelejen Pangan (JIP) dan anggota dalam Kelompok Kerja Jejaring Pengawasan Pangan (JPP). Sedangkan dukungan unit Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian antara lain dalam JKPN: Badan Karantina Pertanian, Ditjen PPHP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Litbang Pertanian.

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran APBN Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) tahun 2013 yang dialokasikan pada kegiatan Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar sebesar Rp. 353.693.160.000,- direvisi menjadi Rp. 339.637.956.000,- terealisasi sebesar Rp. 329.151.639.082,- atau 96,37 %. Untuk anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 14.683.750.000,- direvisi menjadi Rp. 9.472.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.524.844.172,- atau 90,00 %.

Tabel 5 menunjukkan realisasi anggaran tahun 2013. Anggaran terbagi menjadi anggaran Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar (Pusat dan Daerah), anggaran Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan anggaran fortifikasi. Secara umum anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik, kecuali pada kegiatan fortifikasi. Kegiatan fortifikasi merupakan Pilot Proyek yang dilaksanakan dengan dana Hibah *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) melalui ADB. Tidak terealisasi kegiatan fortifikasi dengan baik disebabkan oleh belum terealisasinya pengadaan premix dan feeder yang dilaksanakan oleh ADB. Premix dan feeder yang dialokasikan di ADB merupakan penentu berjalannya proyek. Sehingga kegiatan dengan dana hibah fortifikasi yang dialokasikan pada Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tidak dapat terealisasi dan akan diluncurkan pada Tahun 2014, hanya kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka persiapan fortifikasi beras Tahun 2014 dapat terealisasi 6,63 %.

Tabel 5. Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi	% terhadap sasaran
		Pagu Awal	Revisi		
1	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar (Pusat & Daerah)	353.693.160.000	339.637.956.000	329.151.639.082	96,37
2	Kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	14.683.750.000	9.472.160.000	8.524.844.172	90,00
	a. Bidang Penganekaragaman Pangan	9.895.240.000	5.278.500.00	4.807.441.398	91,08
	b. Bidang Konsumsi Pangan	1.862.050.000	-	1.638.824.175	88,01
	c. Bidang Keamanan Pangan Segar	1.369.650.000	1.069.650.000	965.576.080	90,27
	d. Koordinasi Program Ketahanan Pangan	1.369.650.000	1.261.960.000	1.113.032.519	88,20
3	Fortifikasi	3.518.160.000	-	233.241.000	6,63 *)

Keterangan: *) Tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pengadaan premix dan feeder oleh *Asian Development Bank (ADB)*, anggaran akan diluncurkan Tahun 2014.

3.6. Hambatan

Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, yaitu kendala internal seperti dalam optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya perubahan, pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan serta kendala eksternal seperti permasalahan dalam pencairan dana di daerah, *mindset* petugas tentang keberhasilan kinerja instansi masih seputar realisasi keuangan, seringnya mutasi pejabat daerah, keterlambatan dan tidak berlanjutnya pelaporan di daerah ke pusat, belum semua kabupaten/kota menggunakan aplikasi *Simonev*, beberapa kinerja kegiatan dipengaruhi oleh kinerja instansi lain/lintas sektor, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, masih perlunya pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal non beras, masih adanya praktik-pratik penanganan pangan tidak sesuai dengan kaidah keamanan pangan dan lain-lain.

3.7. Upaya yang dilakukan

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator kinerja antara lain: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi bottleneck (3) meminimalkan wasting time; (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan, (5) monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah, (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah serta lintas sektor.

Untuk mencapai sasaran dan kinerja kegiatan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; (5) pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional; (6) mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha; (7) peningkatan peran perguruan tinggi; (8) kampanye, promosi, sosialisasi secara terus-menerus dan lain-lain.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Kegiatan kinerja lainnya di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:

4.1 Website Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan publik atas tersedianya data dan informasi mengenai penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maka Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengembangkan sebuah situs internet sebagai bagian yang tak terpisahkan dari situs BKP dan situs Kementerian Pertanian. Penyelenggaraan kegiatan situs Pusat PKKP berada dibawah arahan Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh para pejabat Eselon IV Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beserta dengan staf. Penyelenggaraan situs Pusat PKKP pada tahun 2013 telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan penyempurnaan sebagai bentuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta keterbukaan informasi publik.

Penyelenggaraan situs Pusat PKKP mengalami berbagai kendala dan keberhasilan. Kendala utama yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKP ialah mengenai server. Saat ini situs Pusat PKKP masih menumpang pada server Promedia, padahal seharusnya berdomosili pada server Pusdatin. Namun karena adanya perbedaan sistem antara server Pusdatin dengan sistem situs Pusat PKKP maka hingga saat ini situs Pusat PKKP belum bisa ditempatkan pada server Pusdatin dan sampai sekarang terpaksa ditempatkan pada server Promedia. Solusi untuk hal ini ialah melalui perubahan sistem situs Pusat PKKP atau melalui pengadaan server BKP sehingga dapat mengakomodir semua situs yang ada di Badan Ketahanan Pangan.

Permasalahan lain yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKP ialah mengenai sumber daya manusia (SDM). Saat ini SDM untuk pengelolaan situs Pusat PKKP belum memadai sebab dalam penyelenggaraan kegiatan situs diperlukan tim khusus yang fokus di bidang komputer (jaringan, software, dan internet), fokus di bidang administratif (operator), dan ahli di bidang penulisan (substansi mengenai penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan). Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang penyelenggaraan operasional website melalui pelatihan.

4.2 WBK

Pada tahun 2013, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan memperoleh piagam penghargaan dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bersama 3 unit eselon II lainnya di lingkup Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Jenderal. Keberhasilan tersebut diberikan berdasarkan komitmen dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terus menerus, cermat dan tepat baik pada tingkat pimpinan maupun staf. Hal ini

dilakukan agar program dan kegiatan, khususnya kegiatan dalam mendukung Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi, tujuan organisasi Badan Ketahanan Pangan secara efektif dan efisien.

4.3 Kerjasama dengan AVRDC

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL ternyata tidak hanya menarik bagi berbagai pihak di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Kegiatan KRPL yang merupakan kegiatan pemberdayaan bagi kelompok wanita dapat memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung melalui budidaya aneka jenis tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, serta sumber protein hewani di pekarangan. Salah satu lembaga non profit/NGO dari luar negeri yang telah bekerjasama dengan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah AVRDC. AVRDC merupakan organisasi yang bergerak di bidang riset dan pengembangan sayuran. Organisasi ini berkedudukan di Taiwan dan memiliki perwakilan untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Thailand. Kerja sama yang telah dilakukan sejak tahun 2012 adalah berupa keikutsertaan beberapa staf dari Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam pelatihan *International Vegetables Training Course* yang diselenggarakan oleh AVRDC di Thailand. Dalam pelatihan ini diperoleh materi-materi yang terkait dengan budidaya sayuran dan buah dimana materi ini sangat terkait dengan kegiatan KRPL karena sayuran dan buah inilah yang menjadi salah satu komoditas utama yang dikembangkan di pekarangan. Selain itu pada tahun 2013 juga ada pelatihan yang diikuti oleh staf Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tentang pengembangan kebun sekolah yang diselenggarakan di Taiwan. Melalui kerja sama dengan AVRDC ini telah diperoleh ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan pekarangan dan kebun sekolah sebagaimana yang telah dimasukkan juga dalam buku pedoman pelaksanaan gerakan P2KP terkait dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan KRPL.

BAB V

PENUTUP

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan rencana. Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran, maka Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang telah dicapai tentunya akan mempengaruhi pencapaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan, yaitu dalam rangka mencapai skor PPH 91,5 dan Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun 1,5 %. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi dan diperbaiki secara terus menerus sehingga target-target yang belum dapat tercapai di tahun 2013 dapat dipenuhi pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2014

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan